

LAPORAN TAHUNAN 2021



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 2 PALANGKA RAYA 73112

Telepon (0536) 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

e-Mail : dislutkan@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021** ini dapat disusun.

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini merupakan refleksi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2021 dan disusun atas dasar program dan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, laporan dari setiap bidang dan unit pelaksana teknis yang ada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam kegiatan rutin maupun pembangunan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak kekurangan sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat dipergunakan untuk penyempurnaan data pada laporan selanjutnya. Kami pun mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari semua pihak sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palangka Raya, April 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Keadaan Geografis	2
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Sistematika Penyajian	6
II. BIDANG ADMINISTRASI	8
2.1. Organisasi Dinas	8
2.2. Anggaran	32
2.3. Perlengkapan	38
2.4. Kepegawaian	40
III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	46
3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD	46
3.2. Pelaksanaan Kegiatan APBD	49
3.3. Pelaksanaan Kegiatan APBN	72
IV. KERAGAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .	91
4.1. Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	91
4.2. Perikanan Tangkap	99
4.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	107
4.4. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	109
4.5. Unit Pelaksana Teknis	117
V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH	121
5.1. Permasalahan	121
5.2. Upaya Pemecahan Masalah	121
VI. PENUTUP	123
6.1. Kesimpulan	123
6.2. Saran	123

DAFTAR TABEL

	<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1.1.	Data Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah	6
2.1.	Anggaran dan Program Belanja Langsung APBD Tahun 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	33
2.2.	Daftar Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Sampai Akhir Desember 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	34
2.3.	Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) APBN Tahun 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	34
2.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	35
2.5.	Sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	37
2.6.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	39
2.7.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	40
2.8.	Kendaraan Di Atas Air	40
2.9.	Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	43
4.1.	Perkembangan Produksi Budidaya Air Tawar (Budidaya Pembesaran) Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	92
4.2.	Perkembangan Produksi Budidaya kabupaten/Kota Tahun 2021	92
4.3.	Jumlah Produksi Perairan Laut di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	100
4.4.	Jumlah Produksi perairan Umum di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	101
4.5.	Jumlah Produksi Pelabuhan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah 2021	102
4.6.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	102

4.7.	Jumlah Armada Penangkapan di Perairan Laut Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	103
4.8.	Jumlah Armada Penangkapan di Perairan Umum Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	104
4.9.	Jenis Alat Tangkap di Perairan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	104
4.10.	Jenis Alat Tangkap di Perairan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	104
4.11.	Jenis Alat Tangkap di Perairan Laut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	105
4.12.	Jumlah POKMASWAS di Kalimantan Tengah Tahun 2021	108
4.13.	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	110
4.14.	Resiko Bencana dan Bahaya yang terjadi di Pesisir Kalimantan Tengah	111
4.15.	Ekosistem Wilayah Pesisir Kalimantan Tengah	113

RINGKASAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah diarahkan untuk peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan nasional juga diupayakan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pembudidaya/nelayan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pencapaian program/kegiatan kelautan dan perikanan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi selama satu tahun sehingga diharapkan buku laporan ini dapat menjadi bahan informasi rujukan dan umpan balik perencanaan di masa depan sekaligus sebagai pembelajaran kepada masyarakat dengan menyerap dan mempelajari informasi tentang kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Tengah.

Anggaran biaya yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp.30.866.401.459,- yang terdiri dari : APBD sebesar Rp.29.287.985.459,- dan APBN sebesar Rp.1.578.416.000,-.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan yang ada; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, terutama di Unit Pelaksana Teknis Dinas; masih tradisionalnya sistem dan alat tangkap yang digunakan nelayan dengan usaha berskala kecil; belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus *illegal fishing*; masih kurangnya modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terutama bagi pembudidaya ikan maupun UPI skala kecil; dan kurangnya pemahaman pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya sebagai berikut : peningkatan SDM masyarakat perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas; melakukan perbaikan/rehab sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan sarana dan prasarana teknis yang baru; memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap; memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; mencarikan peluang-peluang akses modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan melakukan pembinaan dan penilaian cara budidaya ikan yang baik (CBIB) kepada pembudidaya ikan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya dan kekayaan alam Indonesia yang begitu besar dan melimpah apabila dikelola dengan baik dan benar maka dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan sektor riil perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya. Hal ini didukung dengan begitu besar dan berlimpahnya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat bila dikelola dengan baik dan benar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah harus bersinergi untuk memacu potensi kelautan dan perikanan secara optimal untuk kepentingan masyarakat baik dalam upaya peningkatan pendapatan maupun dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai luhur kearifan lokal sebagai acuan bagi terciptanya pola pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Karena dengan kearifan lokal menggambarkan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk mempertahankan sumberdaya perairan dengan perlindungan habitat dan populasi ikan sebagai komoditas unggulan.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah diarahkan untuk peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan nasional juga diupayakan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pembudidaya/nelayan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan



sumberdaya kelautan dan perikanan melalui *monitoring, controlling* dan *surveillance* (MCS) serta sistem pengawasan masyarakat dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah agar sejalan dengan pembangunan kelautan dan perikanan di pusat dan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 maka disusun Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 dan diharapkan laporan tahunan ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya.

1.2. Keadaan Geografis

1.2.1. Gambaran Umum Fisik Daerah

a. Letak dan Luas Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0°45' Lintang Utara dan 03°30' Lintang Selatan serta 111° - 116° Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km². Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota, dengan 136 kecamatan, 138 kelurahan, serta 1.421 desa. Kondisi alam Kalimantan Tengah saat ini masih lebih banyak kawasan hutan seluas 12.675.364 Ha atau 82,16 %, sedangkan kawasan non kehutanan seluas 2.751.416 Ha atau 17,84 % (berdasarkan hasil penelitian terpadu yang telah melalui uji konsistensi Kementerian Kehutanan *dalam* www.kalteng.go.id).



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Salah satu sungai yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, yaitu Sungai Barito, memiliki panjang mencapai 900 km dengan kedalaman mencapai 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km. Kalimantan Tengah memiliki wilayah lautan yang luas dengan garis pantai sepanjang 750 km di pesisir Laut Jawa.

Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah wilayah Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl (www.kalteng.go.id).

c. Iklim

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis karena dilintasi oleh garis khatulistiwa dengan rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 55,02 % per tahun. Iklim daerah Kalimantan Tengah termasuk tropis basah dan dipengaruhi oleh angin barat dan tenggara yang



berganti setiap 6 bulan sekali sehingga mempengaruhi musim hujan dan musim kering. Hal ini menyebabkan kondisi udara relatif cukup panas pada siang hari mencapai 32,8°C, sedangkan pada malam hari suhu udara berkisar 22,5°C. Sementara rata-rata intensitas curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 224,50 mm. Bagian selatan wilayah Kalimantan Tengah, yang ditandai oleh daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan sungai, merupakan wilayah rawan banjir.

1.2.2. Kemampuan Wilayah

Kemampuan wilayah adalah potensi lahan untuk dapat digunakan sebagai tempat usaha pertanian yang didasarkan pada jenis satuan tanahnya. Setiap satuan tanah mempunyai kelas yang berbeda. Semakin tinggi kelasnya, maka makin buruk / rendah kemampuannya dan semakin terbatas pula kemungkinan penggunaannya.

Terkait dengan potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V, dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

1.2.3. Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan

Pantai laut di selatan Kalimantan Tengah merangkai 7 (tujuh) kabupaten mulai dari Sukamara di barat hingga Kapuas di timur dengan panjang garis pantai ± 750 km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km² memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Selain itu, Kalimantan Tengah juga memiliki kawasan andalan laut yang kaya akan potensi ikan, yakni perairan laut Kuala Pembuang. Sedangkan perairan umum dengan luas ± 2,29 juta Ha dengan potensi sumberdaya ikannya yang cukup besar perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara baik. Pengelolaan dan pemanfaatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungannya dan diperlukan sumber daya manusia



(SDM) yang cakap serta didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan secara optimal, efisien dan berkelanjutan yang berbasis pada pengendalian penangkapan, pengembangan budidaya dan rehabilitasi ekosistem habitat danau dan pesisir, penataan ruang sesuai karakteristik bio - fisik wilayah dan pembudidayaan kembali berbagai jenis sumberdaya ikan ekonomis penting yang mengalami gejala kepunahan.

Di wilayah Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara wilayah. Sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah pedataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam. Kawasan berawa di sektor tengah dan pesisir ini berfungsi sebagai retensi (penyimpan air) saat kelebihan air musim penghujan. Adapun perairan darat di Kalimantan Tengah, yakni sungai, danau, dan rawa dengan luas ± 141.965 Ha, potensial bagi perikanan darat. Dengan sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km.

Adapun sebelas sungai besar yang terdapat di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1. Data Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Sungai	Panjang		Rata-Rata	
		Kilometer (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Kedalaman (Meter)	Lebar (Meter)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	900	700	8	500

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2019

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pencapaian program/kegiatan kelautan dan perikanan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi selama satu tahun sehingga diharapkan buku laporan ini dapat menjadi bahan informasi rujukan dan umpan balik perencanaan di masa depan sekaligus sebagai pembelajaran kepada masyarakat dengan menyerap dan mempelajari informasi tentang kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Tahunan 2021 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

- ❖ **Ringkasan**, pada bagian ini disajikan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan.



- ❖ **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang, keadaan geografis, tujuan penulisan, dan sistematika penyajian.
- ❖ **Bab II Bidang Administrasi**, pada bab ini disajikan tentang organisasi dinas, anggaran, perlengkapan, dan kepegawaian.
- ❖ **Bab III – Bab IV**, yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari APBD maupun APBN dan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021.
- ❖ **Bab V Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021 beserta upaya pemecahan masalahnya.
- ❖ **Bab VI Penutup**, berisi tentang kesimpulan dan saran.
- ❖ **Lampiran**



BAB II BIDANG ADMINISTRASI

2.1. Organisasi Dinas

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

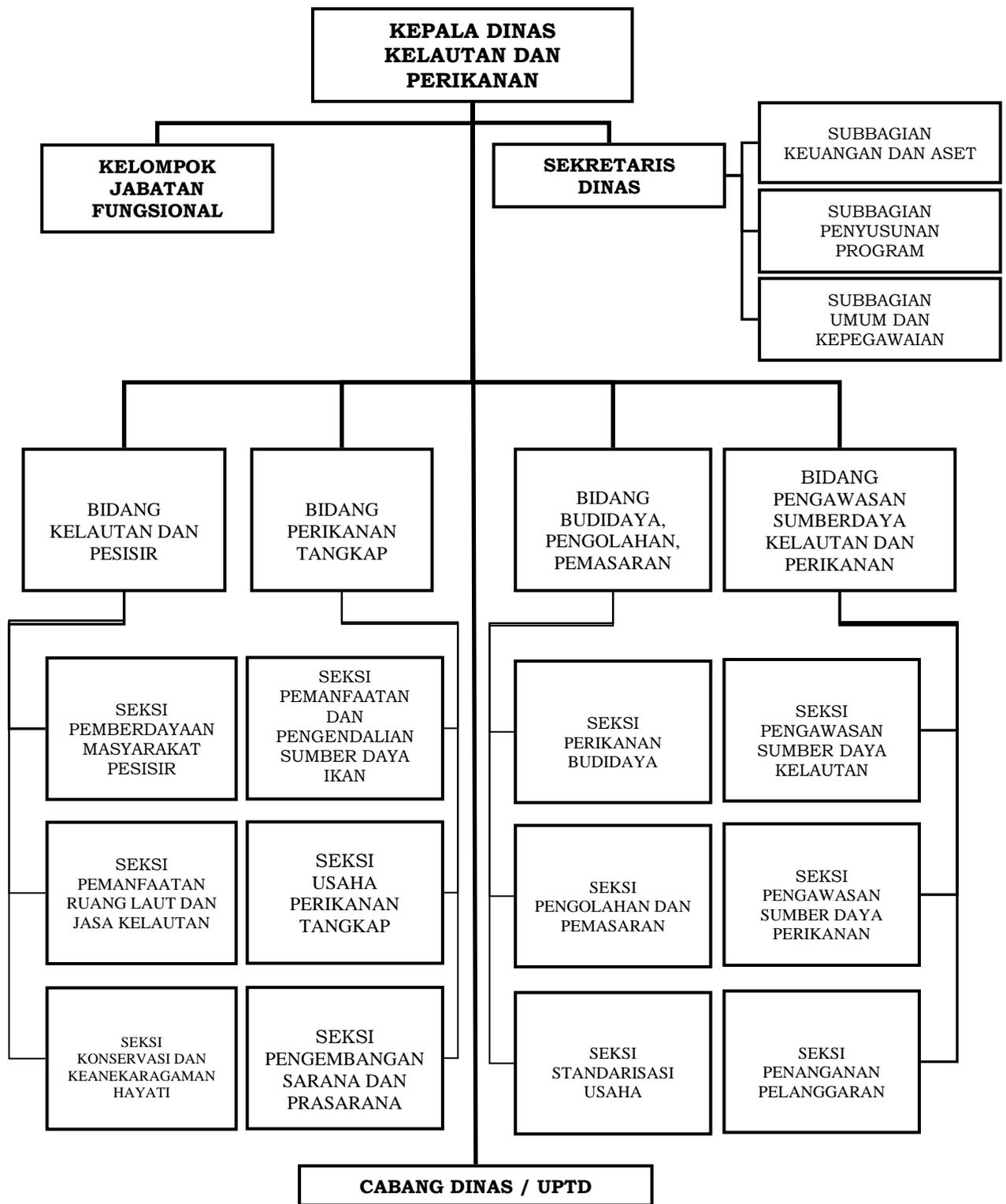


- e. Pelaksanaan tugas lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Standarisasi Usaha.
 2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
 - 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 3. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
 - 2) Seksi Pengawasan Perikanan; dan
 - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran.
 4. Bidang Kelautan dan Pesisir, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan; dan
 - 3) Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas/cabang dinas.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :





Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

2.1.1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan jabatannya, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

1. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas serta perencanaan anggaran;
2. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas;
3. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
5. Pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.



a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
10. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengelola keuangan dan aset. Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan pengelolaan urusan perbendaharaan dan penata usaha keuangan;
7. Menyiapkan bahan rencana kerja inventarisasi dan pengendalian pemanfaatan aset;
8. Menyiapkan bahan penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB);
9. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsipengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaankegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;



3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyiapkan dan mengelola bahan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian urusan ketatausahaan;
7. Menyiapkan bahan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kebersihan kantor;
8. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
9. Melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
10. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

2.1.2. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran.

Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha;



3. Pengoordinasian kegiatan di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundangundangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran.

a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perikanan Budidaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;



5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang perikanan budidaya;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran;



7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

c. Kepala Seksi Standarisasi Usaha

Seksi Standarisasi Usaha mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi usaha. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Standarisasi Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Standarisasi Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang standarisasi usaha;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang standarisasi usaha;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil



Pembudidayaan Ikan, serta tugas lain di bidang standarisasi usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang standarisasi usaha;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi Usaha secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

2.1.3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan jabatannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di bidang perikanan tangkap;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usahaperikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana;
3. Pengoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundangundangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap.



a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk pengelolaan penangkapan ikan di laut sampai dengan 12(dua belas) mil serta tugas lain di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Pengendalian sumber daya ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan;



11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

b. Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap.

Seksi Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan tangkap. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Usaha Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Perikanan Tangkap baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Perikanan Tangkap dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan tangkap;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan;
8. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang usaha perikanan tangkap;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Perikanan Tangkap baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana. Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Izin Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, serta tugas lain di bidang pengembangan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



2.1.4 Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan jabatannya, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran;
3. Pengoordinasian kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang



pengawasan sumber daya kelautan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan, penerbitan surat laik operasi untuk kapal perikanan, serta tugas lain di bidang pengawasan sumber daya kelautan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



b. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan sumber daya perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta tugas lain dibidang pengawasan sumber daya perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



c. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pelanggaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penanganan Pelanggaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Penanganan Pelanggaran sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan pelanggaran;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang penanganan pelanggaran;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan, serta tugas lain di bidang penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanganan pelanggaran;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Pelanggaran baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



2.1.5 Bidang Kelautan dan Pesisir

Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan dan pesisir.

Dalam melaksanakan jabatannya, Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di bidang kelautan dan pesisir;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati;
3. Pengoordinasian kegiatan di bidang kelautan dan pesisir;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundangundangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan pesisir;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan pesisir.

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

b. Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan.

Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan serta pelaksanaan kegiatan lain sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



2. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;
7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi, serta tugas lain di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati sesuai peraturan perundangundangan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

Sejak tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang



ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi pada keempat UPT tersebut adalah sebagai berikut :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;



- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, masing-masing Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau dan laut.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. Pengoordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas



di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. Pengoordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Anggaran

Anggaran biaya yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar Rp.30.866.401.459,- yang terdiri dari :

- **APBD** terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 17.248.798.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.195.761.995,00,- sehingga dana APBD berjumlah **Rp. 29.287.985.459,-**
- **APBN** terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.578.416.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,- Sehingga dana APBN berjumlah **Rp. 1.578.416.000,-**

Rincian dari anggaran biaya tersebut adalah sebagai berikut :



2.2.1 APBD

a. Belanja Langsung

Pagu Anggaran Belanja Langsung adalah Rp.11.381.979.965,- dengan realisasi Rp.10.888.279.793 atau 95,66% yang terdiri dari Program yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Anggaran dan Program Belanja Langsung APBD Tahun 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Fisik (%)
			Rp	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.954.895.884	13.308.582.055	88,99	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	695.897.700	664.150.800	95,44	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.229.931.875	9.089.648.760	98,48	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.241.386.400	2.780.479.650	85,78	100
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.132.037.600	1.070.609.680	94,57	100
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	33.836.000	31.988.000	94,54	100
JUMLAH		29.287.985.459	26.945.458.945	92,00	100

Sumber : Subag Penyusunan Program Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran Gaji Pokok PNS, Tunjangan, Iuran, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021 Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah disediakan sebesar Rp.12.039.186.795,00,- dan sampai akhir Desember 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.282.696.008,00,- (77,10%).

Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sampai akhir Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.2. Daftar Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Sampai Akhir Desember 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp)	Keuangan	
			Rp	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Reprsentasi	5.207.895.399	4.552.021.662	87,41
2	Tunjangan Keluarga	470.331.777	420.482.458	89,40
3	Tunjangan Jabatan	402.517.500	320.760.000	79,69
4	Tunjangan Fungsional	125.706.000	54.696.000	43,51
5	Tunjangan Fungsional Umum	182.173.250	139.250.000	76,44
6	Tunjangan Beras	298.258.149	266.578.020	89,38
7	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	40.174.720	19.753.382	49,17
8	Pembulatan Gaji	130.000	64.486	49,60
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.297.000.000	3.509.090.000	66,25
10	Tambahan Penghasilan Uang Makan	-	-	0,00
11	Insentif Pemungutan Retribusi daerah	15.000.000	-	0,00
JUMLAH		12.039.186.795	9.282.696.008	77,10

Sumber : Subag Keuangan dan Aset Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

2.2.2 APBN

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 selain berasal dari APBD juga didukung dari APBN. Dana APBN yang disediakan Rp. 1.517.429.317,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.578.416.000,- atau 96,14%. Sumber dana berasal dari Dana Dekonsentrasi dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) APBN Tahun 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kegiatan (Satker)	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan		Fisik (%)
			Rp	%	
1	Sekretariat Jenderal (01)	389.233.000	389.098.000	99,97	100
2	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (03)	311.552.000	297.133.500	95,37	100
3	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (04)	573.655.000	529.524.160	92,31	100
4	Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)	134.402.000	132.419.657	98,53	100
5	Direktorat Jenderal P2HP (06)	49.949.000	49.709.000	99,52	100
6	Direktora Jenderal KP3K (07)	119.625.000	119.545.000	99,93	100
JUMLAH		1.578.416.000	1.517.429.317	96,14	100

Sumber : Subag Penyusunan Program Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

Kedua sumber anggaran tersebut di atas (APBD dan APBN) saling bersinergi dalam kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kelautan



dan Perikanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan Visi – Misi dapat tercapai.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam rangka memacu perkembangan pembangunan khususnya di bidang perikanan di Kabupaten/Kota yang dikategorikan mempunyai kapasitas fiskal rendah maka pemerintah memberikan stimulant. Sejak tahun 2004 Departemen Keuangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kabupaten/Kota yang memiliki potensi perikanan prospektif namun memiliki keterbatasan sumber pendanaan pembangunan.

Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 8.898.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.753.622.080,- (98,38 %) dan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Uraian kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp)	Realisasi		
					Keuangan		Fisik (%)
					Rp.	%	
1	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)			6.704.900.000	6.648.000.000	99,15	100
	a Dermaga	800	meter Persegi	6.704.900.000	6.648.000.000	99,15	100
2	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)			553.000.000	531.180.000	96,05	100
	a Rehabilitasi Kolam atau bak Pemijahan/Induk/calon induk/pakan alami/tandon	180	meter Persegi	216.000.000	198.000.000	91,67	100
	b Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar)	30	meter	63.000.000	62.600.000	99,37	100
	c Pembangunan/Rehabilitasi kolam atau Bak Pengelolaan Limbah	20	meter Persegi	24.000.000	23.800.000	99,17	100



LAPORAN TAHUNAN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	d Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul	5	Paket	250.000.000	246.780.000	98,71	100
3	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan dan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil			495.000.000	477.700.000	96,51	100
	a Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi	36	meter Persegi	180.000.000	178.700.000	99,28	100
	b Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara)	25	Paket	125.000.000	110.000.000	88	100
	c Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS)	2	Paket	190.000.000	189.000.000	99,47	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			810.000.000	761.642.080	94,03	100
	a Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP di atas Udara	1	Satuan	450.000.000	436.600.000	97,02	100
	b Perlengkapan POKMASWAS Kecamatan Kumai	6	Paket	180.000.000	325.042.080	90,29	100
	c Perlengkapan POKMASWAS Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	2	Paket	60.000.000			
	d Perlengkapan POKMASWAS Kecamatan Teluk Sampit	2	Paket	60.000.000			
	e Perlengkapan POKMASWAS Kecamatan Pulau Hanaut	2	Paket	60.000.000			
5	Penggunaan Dak Untuk Penunjang Kegiatan			335.100.000	335.100.000	100	100
	a Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual	6	Paket	165.310.000	165.310.000	100	100
	b Pengawasan Kegiatan Kontraktual	15	Orang Bulan	46.650.000	46.650.000	100	100
	c Perjalanan dinas ke lokasi dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	20	Frekuensi	123.140.000	123.140.000	100	100
JUMLAH				8.898.000.000	8.753.622.080	98,38	100



2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp152.300.000,- Realisasi PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp340.177.000,- (223,36%) berasal dari Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.000.000	338.577.000	1354,31
2.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	35.000.000	1.600.000	4,57
3.	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	7.500.000	-	0,00
4.	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	84.800.000	-	0,00
Total PAD Tahun 2016		152.300.000	340.177.000	223,36

Pada tahun 2021 ini, capaian realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target PAD ini tentunya merupakan suatu pencapaian yang baik bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran para pelaku usaha perikanan, terutama pelaku usaha perikanan orang pribadi, untuk mengurus izin usaha perikanannya melalui unit layanan penerbitan perizinan perikanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. Namun dalam hal ini masih terdapat kelemahan terkait izin usaha perikanan yaitu masih terdapat pelaku usaha yang enggan mengurus izin usaha perikanannya. Untuk itu kedepannya strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan adalah dengan terus meningkatkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun melalui APBN, salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi dan gerai terpadu terkait pengurusan izin usaha perikanan dan meningkatkan operasi pengawasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Juga mengoptimalkan layanan website geoportal-lautberkah.kalteng.go.id



untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses pengurusan perizinan perairan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik izin lokasi perairan maupun izin pengelolaan perairan.

2.3 Perlengkapan

2.3.1 Daftar Barang Inventaris Dinas

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat barang inventaris dinas yang dipergunakan untuk kepentingan operasional dinas. Sampai dengan tahun 2021, barang inventaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sarana Fisik

1. Gedung Kantor sebanyak 9 Unit, yaitu :
 - a) Kantor PP Kumai
 - b) Kantor PP Seruyan
 - c) Kantor Dislutkan
 - d) Kantor Lap LPPMHP PIL
 - e) PPI Ujung Pandaran
 - f) PPI Selat Jeruju
 - g) PPI Jelai
 - h) PPI Batanjung
 - i) PPI Bahaur
2. Rumah Dinas sebanyak 11 Unit, yaitu :
 - a) Rumah Dinas PP Seruyan 1 Unit
 - b) Rumah Dinas PP Kumai 6 Unit
 - c) Rumah Dinas Kepala Dinas Dislutkan 1 Unit
 - d) Rumah Dinas Kepala LPPMHP PIL 1 Unit
 - e) Rumah Dinas PPI Selat Jeruju 1 Unit
 - f) Rumah Dinas PPI Batanjung 1 Unit
3. Tanah sebanyak 17 Buah
4. Pos Pengawasan 8 Unit, yaitu :
 - a) Pos Pengawasan
 - b) Bangunan Pos
 - c) Gedung Pos Pengawasan PPI Batanjung
 - d) Pos Pengamanan PP Kumai



- e) Pembangunan Pos Jaga di TPI
- f) Pos Jaga PPI Bahaur
- g) Rumah Pos Jaga
- h) Pos Pengawasan hibah APBN Lingkup Dislutkan

b. Sarana Mobilitas

Sarana mobilitas yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) = 8 Unit
- Kondaraan bermotor roda 2 (dua) = 16 Unit
- Kendaraan di atas air = 15 Unit

Uraian sarana mobilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)

No.	Merk/Tipe Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Keterangan / Kondisi
1	Mobil Pic Up	KH8388AB	2002	Pembelian	Rusak Berat
2	Mobil Toyota Pick Up	KH8302E	2002	Pembelian	Rusak Berat
3	Mobil Toyota Kijang	KH160AU/ KH1043TU	2002	Pembelian	Baik
4	Mobil Toyota New Avanza	KH1283AU	2015	Mutasi dari Ro. Umum	BAIK
5	Mobil Pic Up Colorado	KH 8685AW	2015	Pembelian	Baik
6	Toyota Kijang Innova Venturer	KH 54	2018	Pembelian	Baik
7	Mobil Kijang Inova	KH 1118AU	2019	Hibah APBN	Baik
8	Mobil Suzuki APV	KH1091AU	2019	Hibah APBN	Baik

Tabel 2.7. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)

No.	Merk/Tipe Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Keterangan / Kondisi
1	Honda Karisma	KH2189AY	2004	Pembelian	Baik
2	Suzuki Thunder	KH4179AY	2007	Pembelian	Baik
3	Suzuki Thunder	KH4180AY	2007	Pembelian	Rusak Berat
4	Suzuki Thunder	KH4181AY	2007	Pembelian	Baik
5	Suzuki FL125 RCD	KH5199AY	2014	Pembelian	Baik
6	Honda Supra X	KH5794AY	2014	Pembelian	Baik



7	Honda Supra X	KH5866AY	2014	Pembelian	Baik
8	Honda Supra X	KH5863AY	2014	Pembelian	Baik
9	Honda Supra X	KH5785AY	2014	Pembelian	Baik
10	Honda Supra X	KH5861AY	2014	Pembelian	Baik
11	VIAR	KH3382TY	2018	Pembelian	Baik
12	VIAR	KH3384TY	2018	Pembelian	Baik
13	Honda Kharisma	KH5360AH	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik
14	Honda Kharisma	KH2216AY	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik
15	Honda Kharisma	KH2217AY	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik
16	Honda Kharisma	KH2218AY Ex KH5354AH	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik

Tabel 2.8. Kendaraan Di Atas Air

No.	Merk/Tipe Kendaraan	Jumlah (Unit)	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Keterangan/ Kondisi
1	Kapal Motor	1	2008	Pembelian	TDK
2	Kapal Motor	1	2008	Pembelian	TDK
3	Kapal Motor	1	2008	Pembelian	TDK
4	SpeedBoat	1	2006	Pembelian	TDK
5	SpeedBoat	1	2007	Pembelian	TDK
6	SpeedBoat	1	2007	Pembelian	TDK
7	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
8	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
9	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
10	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
11	Kelotok	1	2007	Pembelian	TDK
12	Kelotok	1	2007	Pembelian	TDK
13	Kelotok	1	2008	Pembelian	TDK
14	Kelotok	1	2008	Pembelian	TDK
15	Kelotok	1	2008	Pembelian	TDK

*Keterangan : TDK = Tidak Diketahui Keberadaannya

2.4 Kepegawaian

2.4.1 Jumlah Pegawai

Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhir tahun 2021 berjumlah 151 orang, PNS berjumlah 93 orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 58 orang, yang dapat dibedakan berdasarkan :



1. Status Kepegawaian :
 - a. PNS
 - Golongan I = 0 orang
 - Golongan II = 1 orang
 - Golongan III = 63 orang
 - Golongan IV = 16 orang
 - b. CPNS = 0 orang
 - c. Tenaga Kontrak = 58 orang
2. Jenis Kelamin (PNS + CPNS + Tekon) :
 - Laki-Laki = 97 orang
 - Perempuan = 54 orang
3. Jenjang Karier (PNS + CPNS) :
 - a. Eselon II A = 1 orang
 - b. Eselon III A = 5 orang
 - c. Eselon III B = 4 orang
 - d. Eselon IV A = 26 orang
 - e. Fungsional = 2 orang
 - f. Non Struktural/Fungsional = 55 orang
4. Pendidikan Terakhir (PNS + CPNS + Tekon):
 - SD = 3 orang
 - SLTP = 3 orang
 - SLTA = 42 orang
 - DIII = 4 orang
 - DIV / S1 = 74 orang
 - S2 = 25 orang
 - S3 = 0 orang

2.4.2 Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada tahun 2021, pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat kenaikan pangkat berjumlah 14 orang. Sedangkan untuk pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala sebanyak 63 orang.



2.4.3 Pensiunan dan Pengangkatan Pegawai

Pada tahun 2021, terdapat 3 orang pegawai yang Pensiun dan tidak terdapat pengangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4.4 Pelatihan Pegawai

a. Pelatihan Penjurangan Karir

Pada tahun 2021, tidak ada pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan pelatihan penjurangan karir, baik itu Spati/Spamen/Sespanas, Sespa/Spamen/PIM Tk. II, Sepadya/Spama/PIM Tk. III, maupun Sepada/Adum/PIM Tk. IV.

b. Pengembangan SDM

Pada program pengembangan SDM, terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Pada tahun 2021, tidak ada pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat Tugas Belajar sedangkan untuk Ijin Belajar sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang ke jenjang Strata-2 dan 6 (enam) orang ke jenjang Strata-1.

Tabel 2. 9. Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	Sekretariat / Bidang	Tenaga Kontrak	CPNS				PNS				Jenis Kelamin		Pendidikan Terakhir						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	LK	PR	SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV/S1	S2	S3
I	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan								1	1							1		
II	Sekretariat	13					7	18	3	22	16		1	16	2	13	6		
	- Sekretaris								1		1						1		
	- Subag Penyusunan Program	3						4	1	5	3					6	2		
	- Subag Umum dan Kepegawaian	9					6	4	1	14	4		1	13	1	2	1		
	- Subag Keuangan dan Aset	1					1	10		3	9			3	1	5	2		
III	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)							7	2	5	4					7	2		
IV	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	6					3	10	3	11	8			3	1	12	3		
V	Bidang Kelautan dan Pesisir						1	7	3	6	5					9	3		
VI	Bidang Perikanan Tangkap	8					1	9	2	14	6			6	1	10	3		
VII	UPT. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	5						3	2	8	2		1	2		7	1		
VIII	UPT. Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran	5					1	4	0	9	3		1	3		7	1		
IX	UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai	11					1	3	0	11	5	1		6		6	3		
X	UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	10						2	0	10	4	2		6		3	3		
Jumlah Pegawai		58	0	0	0	0	0	14	63	16	97	54	3	3	42	4	74	25	0
		58	0				93				151		151						
Jumlah Keseluruhan Pegawai		151																	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DKP Prov. Kalteng, 2021



BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBD tahun 2021 khususnya Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.287.985.459,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 26.945.458.945,- dengan rincian program dan kegiatan yang menggunakan Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Rp. 14.954.895.884,00,-

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.229.496.245	14.954.895.884	13.308.582.055	88,99	99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000,00	450.760.500,00	449.123.000	99,64	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.216.186.795,00	11.184.354.225,00	9.667.926.008	86,44	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000,00	118.663.000,00	109.878.840	92,60	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00	186.630.000,00	182.630.000	97,86	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.400.000,00	491.765.550,00	458.637.499	93,26	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.929.400.000,00	2.305.172.609,00	2.252.737.430	97,73	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.509.450,00	217.550.000,00	187.649.278	86,26	100



**LAPORAN TAHUNAN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

II. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Rp. 695.897.700,-

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	774.170.000,00	695.897.700	664.150.800	95	100
1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	608.170.000,00	599.621.450	578.433.600	96	100
2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	83.000.000,00	68.655.750	65.787.200	95,82	100
3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	83.000.000,00	27.620.500	19.930.000	72	100

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Rp. 9.229.931.875,-

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	774.170.000,00	9.229.931.875	9.089.648.760	98,48	100
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.142.000.000,00	1.831.039.375	1.799.231.875	98	100
2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.000.000,00	10.306.000	9.286.000	90	100



**LAPORAN TAHUNAN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	83.000.000,00	15.721.000	15.221.000	96,82	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	7.525.900.000,00	7.372.865.500	7.265.909.885	98,55	100

**IV. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Rp. 3.241.386.400,-**

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.410.930.000,00	3.241.386.400	2.780.479.650	86	98
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.410.930.000,00	3.241.386.400	2.780.479.650	85,78	98

V. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp. 1.132.037.600,-

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.222.000.000,00	1.132.037.600	1.070.609.680	94,57	100
1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.222.000.000,00	1.132.037.600	1.070.609.680	94,57	100



**VI. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Rp. 33.836.000,-**

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	83.000.000,00	33.836.000	31.988.000	94,54	100
1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	83.000.000,00	33.836.000	31.988.000	94,54	100

Program dan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan secara bersinergi satu dengan yang lain sehingga dapat saling mendukung dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan dukungan dari sumberdaya manusia aparatur, peran serta masyarakat maupun pihak-pihak terkait, terutama kemampuan pembiayaan guna kelancaran pelaksanaan program-program tersebut.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan APBD

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 449.123.000,- (99,64%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	81.388.000	80.850.000	99,34
Keluaran	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	10.802.750	10.706.750	99,11
Keluaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	11.550.000	11.359.000	98,35
Keluaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	19.580.000	19.219.000	98,16
Keluaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	10.978.500	10.797.500	98,35
Keluaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	180.785.250	180.628.250	99,91
Keluaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	135.676.000	135.562.500	99,92
Keluaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 9.667.926.008,- (86,44%) dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	10.790.921.995	9.282.696.008	86
Keluaran	Jumlah tahun	1 tahun	1 tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan PD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	356.102.230	347.906.000	98
Keluaran	Jumlah tahun	1 tahun	1 tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan PD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	19.160.000	19.160.000	100
Keluaran	Jumlah tahun	1 tahun	1 tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan PD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	18.170.000	18.164.000	99,97
Keluaran	Jumlah tahun	1 tahun	1 tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan PD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 109.878.840,- (92,60%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	15.127.500	15.087.000	99,97
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	37.774.500	36.484.840	96,59
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	29.820.000	25.842.000	86,66
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	35.941.000	32.465.000	90,33
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2021 Kegiatan ini telah terealisasi secara keuangan sebesar Rp. 182.630.000,- (97,86%) dan realisasi fisiknya sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:



1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	186.630.000	182.630.000	97,86
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Desember 2021, kegiatan ini telah terealisasi secara keuangan sebesar Rp. 458.637.499,- (93,26 %) dan fisik sebesar 100,00 %. Sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	22.800.000	21.110.000	92,59
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	57.000.000	56.376.000	98,91
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	43.992.000	43.879.000	99,74
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	10.392.000	10.352.000	99,62
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	100.000.000	70.200.000	70
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	27.600.000	27.600.000	100
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	229.981.550	229.120.499	100
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada Kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 2.252.737.430,- (97,73%) dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	4.150.000	4.150.000	100
Keluaran	Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	391.797.309	365.060.930	93,18
Keluaran	Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	22.200.000	20.960.000	94,41
Keluaran	Jumlah tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	1.887.025.300	1.862.566.500	98,70
Keluaran	Jumlah tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 187.649.278,- (86,26%) dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Sub yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut:



1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	153.210.000	127.346.278	83,12
Keluaran	Jumlah tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pemeliharaan Mebel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	3.000.000	3.000.000	100
Keluaran	Jumlah tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	7.100.000	7.050.000	100
Keluaran	Jumlah tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	54.240.000	50.253.000	92,65
Keluaran	Jumlah tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

h. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 578.433.600,- (96%) dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	599.621.450	578.433.600	96
Keluaran	Jumlah Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	1 Tahun	1 Tahun	100 %



Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
	Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

i. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 65.787.200,- (95,82%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	68.655.750	65.787.200	95,82
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



j. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 19.930.000,- (72%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	27.620.500	19.930.000	72
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

k. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 1.799.231.875,- (98 %) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	8.675.000	8.675.000	100
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	1.822.364.375	1.790.556.875	98,25
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 9.286.000,- (90%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Informasi Sumber Daya Ikan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	10.306.000	9.286.000	90
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Informasi Sumber Daya Ikan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

m. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 15.221.000,- (96,82%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	15.721.000	15.221.000	96,82
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



n. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi :

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 7.265.909.885,- (98,55%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	7.117.900.000	7.034.942.000	98,83
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	254.965.500	230.967.885	90,59
Keluaran	Jumlah Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



o. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut :

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 2.780.479.650,- (85,78%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	427.614.500	73.450.000	17,18
Keluaran	Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efesien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	1.879.241.500	1.834.180.600	98
Keluaran	Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efesien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100 %



Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
	Kabupaten/Kota			
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota :

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	885.926.400	824.544.050	93,07
Keluaran	Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di laut dan di kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi :

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	48.604.000	48.305.000	99,38
Keluaran	Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di laut dan di kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



p. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut :

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 1.070.609.680,- (94,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	580.392.000	562.257.000	97
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	134.469.000	126.170.600	93,83
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	417.176.600	382.182.080	91,61
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

q. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran pada kegiatan ini sampai akhir Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 31.988.000,- (94,54%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolah dan Pemasaran Skala Menengah Besar

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	33.836.000	31.988.000	94,54
Keluaran	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBN (Dekonsentrasi/DK tahun 2020 sebanyak 6 (enam) Satuan Kerja (Satker), dengan rincian sebagai berikut :

1. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 01)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (140097/DK) dengan nilai pagu Rp. 389.233.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 389.098.000,- (99,97%) dan Realisasi Fisik 100 % dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.**

- ❖ *Kegiatan :*

1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan
 - Nilai SAKIP KKP
 - Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan
 - Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan
 - Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan



2. *Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan rincian output :*
 - *Layanan Perencanaan Umum*
 - *Layanan Perencanaan Program dan Anggaran*
3. *Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dengan rincian output :*
 - *Laporan Program dan Kegiatan*
 - *Laporan Keuangan dan BMN*
4. *Pengelolaan Data dan Informasi dengan rincian output :*
 - *Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Pusdatin (nilai)*
 - *Nilai SPBE KKP*
 - *Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusdatin*
5. *Layanan Data dan Informasi dengan rincian output :*
 - *Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan*

2. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker-03)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 03 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149028/DK) dengan nilai pagu Rp. 311.552.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 297.133.500,- (95,37%) dan Realisasi Fisik 100 % dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :



• **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.**

❖ Kegiatan :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan
- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan
- Tingkat kemandirian SKPT Saumlaki
- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan
- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi
- Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya
 - Klasifikasi output adalah Pelayanan Publik Lain dengan rincian:
 - Kapal perikanan kewenangan Daerah yang difasilitasi pendaftarannya.

2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan
- Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kab. Merauke
- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan



- Klasifikasi output Pelayanan Publik Lainnya dengan rincian:
 - Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendaftaran Pembangunan SPDN yang dilaksanakan
 - Layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) yang dilaksanakan
- Klasifikasi output Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi dengan rincian:
 - Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar
- 3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
 - Persentase penataan perizinan usaha peangkapan ikan
 - Rata-rata pendapatan nelayan
 - Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna
- Klasifikasi output :
 - Bantuan Masyarakat dengan rincian:
 - Nelayan penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diidentifikasi
 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan rincian :
 - Provinsi yang difasilitasi penerbitan izin perikanan tangkap
 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dengan rincian :
 - Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya.



- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya.
 - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan rincian :
 - Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya
4. *Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :*
- *Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI*
 - *Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan*
 - *Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nunukan*
 - *Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat*
 - *Klasifikasi Output :*
 - *Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi dengan rincian :*
 - *Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model percontohan*
 - *Pemantauan produk dengan rincian :*
 - *Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi*



- **Program Dukungan Manajemen**

- ❖ **Kegiatan :**

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
 - Nilai PM PRB bidang deregulasi kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PM PRB bidang manajemen perubahan Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PM PRB bidang penguatan akuntabilitas Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PMPRB bidang pengawasan Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PM PRB bidang Sistem Manajemen SDM Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PMPRB bidang penataan dan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PM PRB bidang penataan tatalaksana Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai kompetensi ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai PM PRB peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai kinerja ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai peningkatan disiplin ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
 - Nilai kualifikasi ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap



- *Klasifikasi Output :*
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan rincian :
 - Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
 - Layanan Data dan Informasi
 - Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - Laporan Program dan Kegiatan
 - Laporan Keuangan dan BMN

3. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 04)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 04 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149029/DK) dengan nilai pagu Rp. 573.655.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 529.524.160,- (92,31%) dan Realisasi Fisik sebesar 100%, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - ❖ Kegiatan :
 1. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :
 - Jumlah Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
 - Jumlah Sampel Monitoring Residu dan Survaillance Penyakit yang diuji
 - Sarana kawasan perikanan budidaya yang disalurkan ke masyarakat



- Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)
 - Kluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan
 - Klaster Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya yang dikembangkan
 - Prasarana produksi di UPT yang direhabilitasi dan ditingkatkan
 - Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan
 - Jumlah Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang kawasan dan kesehatan ikan
 - Jumlah NSPK Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disusun
 - Jumlah Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis.
 - Klasifikasi Output :
 - Penyidikan dan Pengujian Penyakit dengan rincian.
 - Sampel Monitoring Residu yang diuji
 - Sampel Surveillance Penyakit Ikan yang diuji
2. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :
- Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang diterbitkan



- Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina
- Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan
- Bantuan Premi Asuransi Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang Disalurkan
- Perizinan Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan
- NSPK Produksi dan Usaha yang disusun
- Data dan Informasi Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis
- Jumlah Rekomendasi bidang lahan budidaya yang disiapkan sertipikasinya
- Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Produksi dan Usaha
- **Klasifikasi Output :**
 - Pelayanan Publik kepada lembaga dengan rincian:
 - Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang diterbitkan.
- **Program Dukungan Manajemen**
 - ❖ Kegiatan :
 1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :
 - Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup DJPB
 - Nilai PM PRB DJPB
 - Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal
 - Indeks Profesionalitas ASN



- Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat DJPB
- Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi
- batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran
- Nilai PM SAKIP
- Nilai Maturitas SPIP
- persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
- Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public
- Nilai IKPA
- Nilai NKA
- Klasifikasi Output :
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan rincian:
 - Layanan Perencanaan Program dan Anggaran satker lingkup DJPB.
 - Layanan Data dan Informasi dengan rincian :
 - Layanan Data Statistik Perikanan Budidaya
 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - Laporan Program dan Kegiatan satker lingkup DJPB
 - Laporan Keuangan dan BMN satker lingkup DJPB



4. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 05)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 05 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149030/DK) dengan nilai pagu Rp. 134.402.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 132.419.657,- (98,53%) dan Realisasi Fisik sebesar 100%, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

- **Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan**

- ❖ Kegiatan :

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas
- Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP
- Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP
- Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli
- Persentase penyelesaianperawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP
- Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas
- Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
- Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP

- Klasifikasi Output :



- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan rincian:
 - Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (PN) dalam membantu pengawasan SDKP.
- Program Dukungan Manajemen
 - ❖ Kegiatan :
 1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP
 - Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK
 - Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP
 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
 - Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP
 - Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public
 - Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen. PSDKP
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen. PSDKP



- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP.
- Klasifikasi Output :
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan rincian:
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.
 - Layanan Umum dengan rincian:
 - Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup DJPSDKP
 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - Laporan Program dan Kegiatan lingkup DJPSDKP
 - Laporan Keuangan dan BMN lingkup DJPSDKP

5. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 06)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 06 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149031/DK) dengan nilai pagu Rp. 49.949.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 49.709.000,- (99,52%) dan Realisasi Fisik 100% dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

- **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**

- ❖ Kegiatan :

1. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan indicator kinerja kegiatan Sebagai berikut :
 - Jumlah Pasar Ikan yang dibangun
 - Jumlah kajian rencana pembangunan pasar ikan bertaraf internasional



- Jumlah kampanye Gemarikan
- Jumlah lembaga pengelolaan pasar ikan yang dibina
- Jumlah rekomendasi kebijakan pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri yang dihasilkan
- Jumlah rekomendasi kebijakan strategi akses pasar negara tujuan yang dihasilkan
- Keikutsertaan dalam promosi internasional
- Provinsi yang berpartisipasi dalam promosi Gemarikan, pembinaan pasar dan peningkatan akses pasar
- Jumlah Sentra Kuliner Ikan yang dibangun
- Jumlah perlengkapan pedagang ikan
- Jumlah pasar kuliner dan sentra promosi produk perikanan
- Jumlah peralatan pemasaran
 - Klasifikasi Output :
 - Promosi dengan rincian:
 - Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (PN).

2. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan indicator kinerja kegiatan Sebagai berikut :

- Jumlah Layanan Pra Penerbitan SKP di daerah
- Jumlah RSNI produk hasil KP yang dirumuskan
- Jumlah SKP yang diterbitkan bagi UPI
- Jumlah Sarana dan Prasarana Unit Pengolahan Ikan yang ditingkatkan fasilitasnya



- Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste
- Jumlah ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
- Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan yang disediakan
- Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro kecil yang dibina
- Presentase utilitas UPI.
- Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala menengah besar yang dibina.
- Pemetaan kebutuhan bahan baku untuk UPI ICS.
 - Klasifikasi Output :
 - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan rincian:
 - Rekomendasi Peta Kebutuhan Bahan Baku dan Hasil
 - Penghitungan Utilitas UPI
- Program Dukungan Manajemen
 - ❖ Kegiatan :
 1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan indicator kinerja kegiatan antara lain :
 - Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen DJPDSPKP
 - Nilai PM PRB Ditjen PDS
 - Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup DJPSDPKP



- Tersedianya dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPKP Satker Daerah yang efektif dan efisien
- Indeks Profesionalitas ASN
- Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)
- Nilai PM SAKIP
- Nilai Maturitas SPIP
- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
- Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public
- Nilai IKPA
- Nilai NKA
- Klasifikasi Output :
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan rincian:
 - Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Satker Dekonsentrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

6. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 07)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 07 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149032/DK) dengan nilai pagu Rp. 119.625.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 119.545.000,- (99,93%) dan Realisasi Fisik 100% dengan rincian program dan kegiatan adalah :



- **Program Kualitas Lingkungan Hidup**

- ❖ Kegiatan :

1. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- Jejaring, Kemitraan, Kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut yang diimplementasikan
- Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Kumulatif)
- Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan
- Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan
- Luas Kawasan Konservasi Baru
- Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)
- Tingkat Kemandirian SKPT di Kab Kepulauan Mentawai
- Kelompok Penggerak konservasi yang mendukung Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

- Klasifikasi Output :

- Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dengan rincian:
 - Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional



- Program Dukungan Manajemen
 - ❖ Kegiatan :
 1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Nilai PM PRB Ditjen PRL
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
 - Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran
 - Nilai PM SAKIP
 - Nilai Maturitas SPIP
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
 - Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public
 - Nilai IKPA
 - Nilai NKA
 - Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PRL
 - Klasifikasi Output :
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan rincian:
 - Layanan Perencanaan Program dan Anggaran.
 - Layanan Umum
 - Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan



- Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - Laporan Keuangan dan BMN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD maupun APBN saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tepat guna sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pengambil kebijakan.



BAB IV

KERAGAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1. Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

4.1.1. Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan merupakan kegiatan memelihara ikan, binatang air atau tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan yang bersifat dapat memilih tempat yang sesuai dan memilih metode yang tepat serta komoditas yang diperlukan, sehingga dengan sifatnya yang luwes ini maka pendistribusian produk dapat disesuaikan dengan permintaan yang ada ataupun pemanfaatannya.

Kegiatan budidaya perikanan terdiri atas kegiatan pembenihan, pendederan dan pembesaran yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kegiatan budidaya merupakan suatu mata rantai antara kegiatan pembenihan, pendederan dan pembesaran. Konsep pengembangan komoditas budidaya perikanan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu : (1) perairan, (2) lahan, (3) teknologi budidaya, dan (4) sumberdaya manusia yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemenuhan kebutuhan ikan dimasa akan datang salah satunya adalah melalui kegiatan budidaya. Budidaya air tawar di Kalimantan Tengah adalah salah satu subsektor perikanan budidaya dan memiliki karakteristik yang cukup beragam dibandingkan dengan subsektor perikanan budidaya laut dan budidaya air payau. Budidaya air tawar terdiri dari empat jenis yaitu budidaya kolam, budidaya karamba, budidaya jaring apung dan budidaya sawah.

Usaha Budidaya Perikanan di perairan umum Kalimantan Tengah sangat prospektif, hal itu karena didukung oleh ekologi sumber daya alamnya, pangsa pasar yang cukup baik dan hal yang paling penting dari pengembangan usaha ini adalah langsung menyentuh pada kehidupan masyarakat, khususnya petani ikan yang dapat meningkatkan pendapatan



dan kesejahteraan hidupnya, menciptakan kesempatan kerja serta dapat memenuhi kebutuhan gizi/protein masyarakat.

Produksi perikanan budidaya Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 103,60 %. Perkembangan secara lengkap dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 4.1. Perkembangan Produksi Budidaya Air Tawar (Budidaya Pembesaran) Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2021

No.	Jenis	Tahun 2020	Tahun 2021*	Perkembangan (%)
I	Budidaya Air Tawar Budidaya Pembesaran	116.729,40	120.936,59	103,60
	Jumlah	116.729,40	120.936,59	103,60

Sumber : Tim Statistik DKP Prov. Kalteng, 2021

*Data sementara statistik 2021 (Hasil dari aplikasi Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Sedangkan untuk Produksi Budidaya Air Tawar (Budidaya Pembesaran) tahun 2021 sebanyak 3.719.121 ekor. Dari 7 (tujuh) Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah, budidaya tambak berada di 6 (enam) Kabupaten Pesisir yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, kecuali 1 (satu) Kabupaten yang masih belum ada kegiatan budidaya tambak yaitu Kabupaten Katingan.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel data produksi budidaya air tawar (budidaya pembesaran dan budidaya perbenihan) berdasarkan Kabupaten/Kota :

Tabel 4.2. Perkembangan Produksi Budidaya Kabupaten/Kota Tahun 2021*

No	Kabupaten/Kota	Produksi Budidaya	
		Budidaya Pembesaran (ton)	Budidaya Pembesaran (ekor)
1.	Kapuas	18.050,57	1.181.444
2.	Pulang Pisau	4.420,30	14.431
3.	Gunung Mas	3.729,24	91.715
4.	Kotawaringin Timur	13.725,55	365.780
5.	Seruyan	15.849,16	450



6.	Katingan	6.343,17	462.455
7.	Kotawaringin Barat	9.575,32	67.309
8.	Sukamara	2.112,97	184
9.	Lamandau	1.683,61	203.995
10.	Barito Selatan	8.953,37	978
11.	Barito Timur	1.498,92	113.620
12.	Barito Utara	9.035,11	401.060
13.	Murung Raya	2.816,01	4.000
14.	Palangka Raya	23.143,26	811.700

Sumber : Tim Statistik DKP Prov. Kalteng, 2021

* Data sementara statistik 2021 (Hasil dari aplikasi Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Dari tabel diatas juga dapat dilihat produksi pembesaran terbesar di Kota Palangka Raya sebanyak 23.143,46 ton dan produksi budidaya perbenihan terbesar di Kabupaten Kapuas sebanyak 1.181.444 ekor.

Secara umum perkembangan budidaya perbenihan masih kurang jika dibandingkan dengan budidaya pembesaran. Untuk itu perlu motivasi dari dinas terkait bagi masyarakat/nelayan agar dapat mengembangkan lebih besar lagi serta mengupayakan menarik minat investor agar dapat menanamkan modal dalam kegiatan usaha budidaya pembesaran maupun perbenihan.

Usaha budidaya ikan air tawar yang telah berkembang di Perairan Umum Kalimantan Tengah jika dilihat wadah atau jenis areal budidaya ikan yang digunakan adalah kolam, keramba/jaring apung dan sawah/mina padi/tatah beje. Prospek untuk usaha Budidaya Air Tawar sangatlah menjanjikan untuk dikembangkan mengingat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Sungai, Danau dan Rawa yang masih berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang hidup di Daerah Aliran Sungai dengan pola pemeliharaan di dalam Kolam, Keramba dan Jaring Apung.

Jenis ikan yang dibudidayakan umumnya ikan introduksi seperti Patin, Mas dan Nila, sedangkan beberapa jenis ikan lokal masih belum banyak berkembang. Upaya meningkatkan produksi ikan air tawar, perlu dilakukan dengan usaha pengembangan sektor perikanan budidaya berupa



kegiatan pengembangan SDM dan peningkatan penguasaan teknologi budidaya perikanan.

a. Budidaya Kolam

Budidaya ikan di kolam untuk wilayah Kalimantan Tengah setiap tahunnya terus meningkat, banyak masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan usaha budidaya ikan di kolam. Minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha bidang perikanan khususnya budidaya ikan di kolam masih tinggi.

b. Budidaya Keramba

Kegiatan budidaya keramba umumnya dilaksanakan di perairan umum seperti sungai, waduk/danau dan cukup banyak memberikan kontribusi terhadap produksi ikan secara keseluruhan.

c. Jaring Apung

Kegiatan budidaya jaring apung umumnya dilaksanakan di perairan umum seperti sungai, waduk/danau.

d. Budidaya di Sawah

Untuk wilayah Kalimantan Tengah usaha budidaya sawah tidak terlalu banyak dikembangkan karena kondisi persawahan di Kalimantan Tengah masih mengandalkan tadah hujan. Pada tahun 2021 di Kabupaten Sukamara telah melakukan budidaya minapadi dan produksinya sebesar 0,96 ton. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan nila.

e. Budidaya Tambak Sederhana

Untuk wilayah Kalimantan Tengah usaha budidaya tambak terdapat di 6 (enam) Kabupaten pesisir yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, kecuali Kabupaten Katingan yang masih belum mengembangkan budidaya tambak. Umumnya budidaya tambak di Kalimantan Tengah diusahakan dengan cara tradisional dengan kendala utama yang dihadapi pembudidaya tambak belum adanya irigasi teknis, terbatasnya modal usaha terutama dalam penyediaan nener dan benur, pakan dan peralatan penunjang lainnya.



Kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada tahun 2021 adalah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut. Dalam rangka pengelolaan pembudidayaan ikan di laut ada beberapa sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Di Laut

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena pengadaan langsung gagal dan dana dikembalikan ke negara.

b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan pakan dan benih ikan ke beberapa daerah yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kota Palangka Raya, Desa Tumbang Tanjung dan Desa Tumbang Lahang. Untuk Kabupaten Kapuas diberikan bantuan benih Ikan Nila sebanyak 10.000 ekor, benih Ikan Patin sebanyak 25.000 ekor, pakan benih sebanyak 200 kg, pakan pembesaran 1.200 kg. Untuk Kabupaten Katingan diberikan bantuan benih Ikan Nila sebanyak 80.000 ekor, benih Ikan Patin sebanyak 30.000 ekor, pakan benih sebanyak 500 kg, dan pakan pembesaran sebanyak 4.800 kg. Untuk Kabupaten Seruyan diberikan bantuan benih Ikan Nila sebanyak 20.000 ekor, benih Ikan Patin sebanyak 35.000 ekor, pakan benih sebanyak 200 kg, dan pakan pembesaran sebanyak 1.350 kg. Untuk Kota Palangka Raya diberikan bantuan benih Ikan Nila sebanyak 65.000 ekor, benih Ikan Patin 35.000 ekor, pakan benih sebanyak 500 kg, pakan pembesaran sebanyak 2.400 kg. Untuk Desa Tumbang Tanjung dan Tumbang Lahang diberikan bantuan Ikan Nila sebanyak 140.000 ekor, benih Ikan Patin 70.000 ekor, pakan benih sebanyak 1.200 kg, pakan pembesaran 9.000 kg.

Selain itu juga diberikan bantuan benur udang windu sebanyak 1.500.000 ekor dan pakan udang sebanyak 1.000 kg di Lempuyang Kabupaten Kotawaringin Timur, bantuan kolam ikan sistem bioflok di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar .



- c. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan ini yaitu penyediaan operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran berupa pengadaan benur udang, pakan udang, naupli udang, rehabilitas kolam, rehabilitas bak pengolah limbah, rehabilitas saluran pasok masuk dan buang keluar. Selain itu juga penyediaan operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai berupa pengadaan calon induk nila dan pakan agar menghasilkan benih sebar untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya sarana dan prasarana serta operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran dan tersedianya sarana dan prasarana serta operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai.

- d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) di wilayah pesisir meliputi Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas. Hasil yang dicapai yaitu terbitnya Sertifikasi CBB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) sebanyak 21 buah. Selain itu dilakukan juga pembinaan terhadap UPTD/BBI (Balai Benih Ikan) di Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Kapuas, dan Pulang Pisau. Hasil yang dicapai yaitu terbitnya perpanjang masa berlaku sertifikat CPIB (Cara Perbenihan Ikan yang Baik) sebanyak 8 sertifikat meliputi 5 sertifikat di Kabupaten Kapuas, 2 sertifikat di Kota Palangka Raya, dan 1 sertifikat di Kotawaringin Timur. Melalui kegiatan ini, diharapkan pembudidaya ikan mengetahui dan memahami tentang cara budidaya ikan yang baik agar para pembudidaya dapat memproduksi hasil perikanan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah selain peningkatan produksi yang ramah lingkungan, juga aspek mutu, gizi, kesehatan dan keamanan pangan. Selain itu, dengan memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para pembudidaya



ikan, diharapkan dapat mendorong para pembudidaya ikan yang belum memiliki sertifikat CBIB agar segera mengajukan usulan sertifikat CBIB.

4.1.2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Usaha pengolahan produk perikanan merupakan salah satu kegiatan pasca panen yang bertujuan untuk mengawetkan ikan guna menjaga agar produk perikanan tersebut dapat sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi (*consumeable*). Hal ini dikarenakan ikan merupakan komoditi pangan yang mudah membusuk (*highly perishable food*).

Ikan merupakan salah satu produk pangan sumber protein tinggi, mengandung asam lemak tak jenuh, omega-3, kalsium dan yodium, serta berbagai zat gizi lain yang cukup berkualitas. Berbagai kandungan zat gizi dalam ikan tersebut dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel otak (kecerdasan) pada anak, mencegah penyakit jantung koroner dan gondok, menghilangkan kekakuan pada persendian tulang, mempertajam retina mata (penglihatan) serta mencegah *premature aging* (penuaan dini). Hal ini berarti sumber gizi dari ikan merupakan modal dasar bagi kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan sehat.

Pengolahan dan pengawetan produk perikanan selain menambah daya tahan juga meningkatkan nilai tambah produk perikanan tersebut. Pengolahan dan pengawetan ikan di Kalimantan Tengah umumnya dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang sederhana. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan dengan mengadopsi informasi-informasi terbaru tentang metode pengolahan yang cocok untuk diterapkan di daerah Kalimantan Tengah. Penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan dapat dilakukan melalui pelatihan/kursus pengolahan dan demonstrasi pengolahan, serta penyebaran brosur dan leaflet bagi pengembangan usaha yang sudah berjalan (terutama bagi pengolah tradisional) sehingga usaha yang dilakukan berkembang ke arah yang lebih maju.

Pemasaran hasil perikanan merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli sebagai konsumen, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Program dan kegiatan



pemasaran ikan untuk konsumsi diarahkan guna menunjang kelangsungan upaya tingkat perbaikan dan tingkat penghasilan nelayan/pembudidaya ikan serta pengolah ikan, juga untuk menyediakan makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi dan menarik selera bagi konsumen, serta mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan para pelaku terutama dalam memberi nilai tambah.

Produk segar adalah setiap produk perikanan baik utuh atau produk yang mengalami perlakuan pembuangan isi perut, insang, pemotongan kepala dan pemfilletan (produk preparasi), termasuk produk yang dikemas secara vacuum atau modifikasi atmosfer yang belum mengalami perlakuan pengawetan selain pendinginan.

Produk olahan adalah setiap hasil perikanan yang telah mengalami proses kimia atau fisika seperti pemanasan, pengasapan, penggaraman, pengeringan atau pengacaran dan lain-lain, baik yang berasal dari produk yang didinginkan atau produk beku baik yang dikombinasikan dengan bahan makanan lain atau kombinasi dari beberapa proses.

Produksi olahan adalah jumlah produk perikanan yang diolah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah (baik dinyatakan dengan berat atau karton) karena sesuatu perlakuan yang dilakukan baik oleh perusahaan pengolahan ataupun rumah tangga pengolahan.

Kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan terdiri dari : pengalengan, pembekuan, penggaraman, pemindangan, pengasapan, fermentasi, pelumatan daging ikan, penanganan segar, dan pengolahan lainnya. Sedangkan yang termasuk kegiatan usaha pemasaran hasil perikanan terdiri dari : pengumpul, pedagang besar / distributor, pengecer, restoran / rumah makan, catering, dan hotel.

Di Kalimantan Tengah, unit pengolahan ikan yang ada masih berskala kecil. Pada tahun 2021 jumlah produksi pengolahan di Kalimantan Tengah mencapai 24.614,13 ton (*Data masih merupakan angka sangat sementara dari aplikasi Validasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan*), meningkat 161,79% dari jumlah produksi pengolahan tahun 2020 yang mencapai 15.212,84 ton.

Kegiatan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tahun 2021 adalah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi



Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub kegiatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada bulan November 2021 yang dilaksanakan secara daring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu tersosialisasikannya gemar makan ikan di masyarakat serta anak sekolah sehingga dapat meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI). Kegiatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan berupa promosi produksi olahan hasil perikanan yang bertujuan agar semakin luasnya pemasaran olahan hasil perikanan. Selain itu ada kegiatan pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan berupa pembinaan standar kelayakan pengolahan agar setiap UPI memiliki sertifikat kelayakan pengolahan dan dapat meningkatkan pemasaran ke luar pulau dan luar negeri.

4.2. Perikanan Tangkap

4.2.1. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 151.510,50 Ton yang terdiri dari penangkapan di perairan laut sebesar 101.190,23 Ton, penangkapan di perairan umum sebesar 49.445,13 Ton dan penangkapan di pelabuhan-pelabuhan perikanan sebesar 875,14 Ton. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 dengan produksi perikanan tangkap tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 2.776,11 Ton. Penurunan produksi perikanan tangkap tersebut terdapat pada kedua sektor penangkapan yaitu penangkapan di perairan laut sebesar 7.542,46 Ton dan dari sektor penangkapan di pelabuhan perikanan sebesar 163,89 Ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap terdapat pada sektor penangkapan di perairan umum daratan sebesar 4.930,24 Ton.



Jumlah produksi penangkapan di laut berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Jumlah Produksi Perairan Laut di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

No.	Kab/Kota	Jumlah (Ton)		Selisih (-/+)
		2020	2021	
1.	Kotawaringin Barat	22.963,65	21.818,32	(1.145,33)
2.	Kotawaringin Timur	27.063,08	23.670,98	(3.392,1)
3.	Kapuas	12.030,62	11.888,28	(142,34)
4.	Sukamara	3.174,70	2.385,32	(789,38)
5.	Seruyan	12.089,81	12.021,54	(68,27)
6.	Katingan	14.699,12	13.002,51	(1.696,61)
7.	Pulang Pisau	16.711,71	16.403,27	(308,44)

Sumber : Statistik Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

Gambaran data produksi tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 4.1. Produksi Perairan Laut per Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2021



Dari grafik dan tabel terlihat capaian produksi tangkap yang tertinggi terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebesar 23.670,98 ton.



Sedangkan capaian produksi perikanan tangkap yang terendah terdapat pada Kabupaten Sukamara sebesar 2.385,32 ton.

Sementara jumlah produksi penangkapan di perairan umum berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah per kuartal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Jumlah Produksi Perairan Umum di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

No.	Kab/Kota	Jumlah (Ton)		
		2020	2021	Selisih (- / +)
1.	Kotawaringin Barat	4.451,95	4.034,10	(417,85)
2.	Kotawaringin Timur	1.765,50	4.733,61	2.968,11
3.	Kapuas	7.899,43	11.606,58	3.707,15
4.	Barito Selatan	2.609,27	2.179,46	(429,81)
5.	Barito Utara	4.706,41	81,01	(4.625,4)
6.	Sukamara	1.558,95	1.367,89	(191,06)
7.	Lamandau	1.341,77	695,12	(646,65)
8.	Seruyan	7.457,79	9.574,84	2.117,05
9.	Katingan	4.410,18	4.461,38	51,2
10.	Pulang Pisau	3.170,61	3.254,75	84,14
11.	Gunung Mas	231,10	113,70	(117,4)
12.	Barito Timur	1.302,92	1.899,76	596,84
13.	Murung Raya	330,73	450,19	119,46
14.	Kota Palangka Raya	3.278,26	4.992,74	1.714,48

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi di beberapa Kabupaten/Kota. Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum yang tertinggi terdapat di Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 11.606,58 ton. Sedangkan capaian produksi perikanan tangkap yang terendah terdapat pada Kabupaten Barito Utara sebesar 81,01 ton.

Sementara jumlah produksi penangkapan di pelabuhan perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.5. Jumlah Produksi Pelabuhan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	Kab/Kota	Jumlah (Ton)
1.	Kotawaringin Barat	461,45
2.	Seruyan	413,69

Pada tahun 2021 Pelabuhan perikanan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan sudah mulai beroperasi dan menghasilkan produksi perikanan tangkap. Capaian produksi perikanan tangkap di pelabuhan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 461,45 ton.

Perkembangan produksi perikanan tangkap pada perairan umum dan perairan laut dari tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

No.	Kabupaten/Kota	Perairan Umum (Ton)		Laut (Ton)	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Kotawaringin Barat	4.451,95	4.034,10	22.963,65	21.818,32
2.	Kotawaringin Timur	1.765,51	4.733,61	27.063,08	23.670,98
3.	Kapuas	7.899,43	11.606,58	12.030,62	11.888,28
4.	Barito Selatan	2.609,28	2.179,46	0	0
5.	Barito Utara	4.706,41	81,01	0	0
6.	Sukamara	1.558,95	1.367,89	3.174,70	2.385,32
7.	Lamandau	1.341,77	695,12	0	0
8.	Seruyan	7.457,79	9.574,84	12.089,81	12.021,54
9.	Katingan	4.410,18	4.461,38	14.699,12	13.002,52
10.	Pulang Pisau	3.170,61	3.254,75	16.711,71	16.403,27
11.	Gunung Mas	231,10	113,70	0	0
12.	Barito Timur	1.302,92	1.899,76	0	0
13.	Murung Raya	330,73	450,19	0	0
14.	Kota Palangka Raya	3.278,26	4.992,74	0	0



No.	Kabupaten/Kota	Perairan Umum (Ton)		Laut (Ton)	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
	JUMLAH	44.514,89	49.445,13	108.732,69	101.190,23

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum dan penurunan produksi perikanan tangkap di perairan laut dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk produksi perikanan tangkap di perairan umum tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 11,07% dari total produksi tahun 2020, sedangkan untuk produksi perairan laut terjadi penurunan sebesar 6,94% dari total produksi tahun 2020.

4.2.2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

1. Armada Tangkap

Jumlah armada penangkapan di perairan laut tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perubahan, berjumlah 11.937 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 2.661 unit, motor tempel sebanyak 4.300 unit, dan kapal motor sebanyak 4.976 unit.

Tabel 4.7. Jumlah Armada Penangkapan di Perairan Laut Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Jenis Armada	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
	(Unit)	(Unit)	
A. Perairan Laut	11.366	11.937	5,02
Perahu Tanpa Motor	2.596	2.661	2,50
Motor Tempel	4.050	4.300	6,17
Kapal Motor	4.720	4.976	5,42

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Kalteng, 2021

Sedangkan jumlah armada penangkapan di perairan umum pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perubahan, berjumlah 35.759 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 13.051 unit, motor tempel sebanyak 19.228 unit, dan kapal motor sebanyak 3.480 unit.



Tabel 4.8. Jumlah Armada Penangkapan di Perairan Umum Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Jenis Armada	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
	(Unit)	(Unit)	
A. Perairan Umum	29.018	35.759	23,23
Perahu Tanpa Motor	10.237	13.051	27,49
Motor Tempel	15.335	19.228	25,39
Kapal Motor	3.446	3.480	0,99

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Kalteng, 2021

2. Alat Tangkap

Untuk jenis alat tangkap yang digunakan untuk kegiatan penangkapan di perairan laut dan perairan umum, jenisnya sangat beraneka ragam.

Tabel 4.9. Jenis Alat Tangkap di Perairan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Jenis Alat Tangkap	Tahun 2021
Jaring Insang	12.466
Jaring Angkat	712
Pancing	10.473
Perangkap	9.613
Lainnya	2.038
JUMLAH	35.302

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

Tabel 4.10. Jenis Alat Tangkap di Perairan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Jenis Alat Penangkapan Ikan		Tahun 2021
Alat yang dijatuhkan	Jala jatuh berkapal	4
	Jala tebar	4.882
Alat penjepit dan melukai	Tombak (termasuk Garpu)	185
	Panah	-
Jumlah		5.071

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Prov. Kalteng, 2021



Tabel 4.11. Jenis Alat Tangkap di Perairan Laut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Jenis Alat Tangkap	Tahun 2021
Penggaruk Kapal	15
Pukat Cincin	22
Pukat Dorong	1.161
Jaring Insang Hanyut	4.651
Jaring Insang Lingkar	5
Jaring Insang Tetap	1.550
Payang	5
Rawai Dasar	615
Bubu (Termasuk Bubu Ambal)	1.893
Togo	192
Lampara dasar	91
Jala Tebar	615
Jumlah	10.810

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Prov. Kalteng, 2021

Beberapa kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada tahun 2021 adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Dalam rangka Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ada beberapa sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing pada anggaran kegiatan.

b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan bantuan kapal ukuran 5 GT di beberapa lokasi yaitu 3 unit di Desa Sei Jum Kabupaten Kotawaringin Timur dan 2 unit di Desa Kuala Pembuang 2 Kabupaten Seruyan. Selain itu juga diberikan bantuan kapal ukuran 2 GT sebanyak 4 unit di Sungai Bakau Kabupaten Kotawaringin Barat dan mesin kapal 75 unit di Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap.

2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



Dalam rangka Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ada satu sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing pada anggaran kegiatan.

3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Dalam rangka Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ada satu sub kegiatan, yaitu:

a. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing pada anggaran kegiatan untuk dana Covid 19.

4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ada beberapa sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Kegiatan ini berupa pembangunan dermaga pelabuhan perikanan di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan.

b. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan berupa supervisi dan pembinaan pelabuhan perikanan ke Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Tujuannya yaitu agar terlaksananya fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan.



4.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan itu mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoodinasikan pengembangan untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada tahun 2021, upaya penurunan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) sebagai upaya kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya selaras dengan ketentuan yang berlaku dan membina hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum supaya di dalam penegakkan/penerapan sanksi hukum dapat diproses lebih cepat dengan sanksi hukum yang berat dan dalam pelaksanaan kegiatannya dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS). Dimana POKMASWAS ini berfungsi sebagai mediator atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah atau juga dengan petugas pengawasan yang melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa kegiatan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 adalah :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Dalam rangka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ada beberapa sub kegiatan, yaitu :

a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil

Kegiatan ini berupa pengawasan ke Kawasan Konservasi Gosong Senggora dan Gosong Beras Basah. Di kawasan ini tidak boleh dilakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti trawl/pukat harimau. Pada kawasan tersebut dilarang adanya tambat labuh kapal di Kawasan Konservasi. Selain itu juga dilakukan pemantauan dan koordinasi ke 7 kabupaten pesisir yaitu Katingan, Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Sukamara, dan Seruyan terkait



pengawasan, identifikasi, dan pembinaan. Pembinaan ini dilakukan ke para pelaku usaha seperti nelayan tangkap, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan.

b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

Kegiatan ini berupa patroli pengawasan ke Perairan Laut Seruyan pada tanggal 20 - 23 April 2021 dan 5 - 8 Juli 2021. Selain itu juga dilakukan patroli pengawasan ke Perairan Laut Kotawaringin Barat pada tanggal 24 - 27 Mei 2021 dan 24 - 27 Oktober 2021. Pihak yang terlibat dalam patroli tersebut yaitu Polisi Air dan Udara, ASN dibidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, ASN Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, dan ASN Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan.

c. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan di kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah maka perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengukuhan POKMASWAS sebanyak 16 Kelompok yaitu di Kabupaten Barito Timur pada tanggal 20 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) kelompok yang dikukuhkan, di Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 November 2021 ada 4 (empat) kelompok yang dikukuhkan, di Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Juli 2021 ada 10 (sepuluh) Kelompok yang dikukuhkan. Jumlah POKMASWAS di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12. Jumlah POKMASWAS di Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS	POKMASWAS AKTIF	POKMASWAS yang Dikukuhkan	Keterangan
1.	Kotawaringin Timur	45	6	0	
2.	Kotawaringin Barat	21	6	0	
3.	Palangka Raya	15	15	10	



4.	Sukamara	6	6	0	
5.	Pulang Pisau	5	5	0	
6.	Barito Utara	18	0	0	
7.	Barito Timur	9	5	2	
8.	Kapuas	26	5	4	
9.	Seruyan	15	0	0	
10.	Murung Raya	13	0	0	
11.	Gunung Mas	0	0	0	
12.	Barito Selatan	41	4	0	
13.	Katingan	8	1	0	
14.	Lamandau	9	0	0	
	Jumlah	231	53	16	

Sumber : Bidang PSDKP DKP Prov Kalimantan Tengah, 2021

Melihat banyaknya jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk tentunya diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang merusak kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Dalam hal penanganan tindak pidana perikanan masih memerlukan perhatian yang lebih besar dan dukungan serta koordinasi dari aparat dan masyarakat. Tujuan dari adanya pengukuhan POKMASWAS ini adalah agar POKMASWAS lebih memiliki integritas dan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mengerti dan menyadari pentingnya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan sekitar. Selain itu pengukuhan bertujuan agar tercipta tertib di dalam usaha penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta budidaya perikanan sehingga semua usaha di bidang kelautan dan perikanan ini akan berkelanjutan, bertanggung jawab dan sumber daya ikan lestari sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan peran POKMASWAS sebagai ujung tombak pengawasan terhadap kegiatan *illegal fishing* yang ada di daerah.

4.4. Kelautan dan Pesisir

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°-116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 153.828 km² , untuk wilayah perairan dengan cakupan kewenangan sejauh 12 Mil Laut Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah perairan seluas 12.536,1 km² dengan luas pesisir sebesar 100.403 km² atau 65,27 % dari total Provinsi



Kalimantan Tengah. Wilayah pesisir ini terdiri dari 4.863 km² luas wilayah darat dan 95.540 km² luas lautan. Panjang pantai wilayah pesisir ini mencapai 750,6 km yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten pesisir, yaitu :

1. Kabupaten Kapuas, berada di 1 (satu) kecamatan : Kecamatan Kapuas Kuala.
2. Kabupaten Pulang Pisau, berada di 2 (dua) kecamatan : Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala.
3. Kabupaten Katingan, berada di 2 (dua) kecamatan : Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai. berada di
4. Kabupaten Kotawaringin Timur, berada di 3 (tiga) kecamatan : Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Teluk Sampit, dan Kecamatan Pulau Hanaut.
5. Kabupaten Seruyan, berada di 1 (satu) kecamatan : Kecamatan Seruyan Hilir.
6. Kabupaten Kotawaringin Barat, berada di 2 (dua) kecamatan : Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan.
7. Kabupaten Sukamara, berada di 2 (dua) kecamatan : Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci.

Secara rinci luas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota/Kota	Luas Wilayah (Km2.)	% Terhadap Luas Kal-Teng
1	Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	10.759	7,01
2	Kotawaringin Timur	Sampit	16.496	10,74
3	Kapuas	Kuala Kapuas	14.999	9,77
4	Barito Selatan	Buntok	8.830	5,75
5	Barito Utara	Muara Teweh	8.300	5,4
6	Sukamara	Sukamara	3.827	2,49
7	Lamandau	Nanga Bulik	6.414	4,18
8	Seruyan	Kuala Pembuang	16.404	10,68
9	Katingan	Kasongan	17.800	11,59
10	Pulang Pisau	Pulang Pisau	8.997	5,86
11	Gunung Mas	Kuala Kurun	10.804	7,04
12	Barito Timur	Tamiang Layang	3.834	2,5
13	Murung Raya	Puruk Cahu	23.700	15,43
14	Palangka Raya	Palangka Raya	2.400	1,56
Kalimantan Tengah		Palangka Raya	153.564	100,00

Sumber : Kalimantan Tengah dalam Angka, 2013



Menurut peta rawan bencana gempa bumi Indonesia skala 1 : 500.000, yang menggambarkan nilai intensitas tingkat kerusakan akibat gempa, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang aman dari kerusakan akibat gempa. Menurut peta geologi Indonesia, pesisir Kalimantan Tengah tidak terdapat patahan geologi yang dapat mengakibatkan gempa dan tsunami.

Tabel 4.14. Resiko Bencana dan Bahaya Yang Terjadi di Pesisir Kalimantan Tengah

Kecamatan	Abrasi	Kebakaran Lahan Gambut dan Asap	Industri	Limbah Kayu	Sedimentasi	Total
Jelai	1.496	39.914	-	2	8.957	50.369
Arut Selatan	-	9.429	-	-	-	9.429
Kumai	817	89.962	38	708	8.420	99.945
Seruyan Hilir	31	188.454	-	1.546	5.449	195.480
Teluk Sampit	2.011	36.827	-	364	1.411	40.613
Pulau Hanaut	3.557	24.992	-	262	51	28.862
Katingan Kuala	5.294	166.237	-	738	1.597	173.866
Pulang Pisau	11.200	237.644	-	467	14.871	264.182
Kuala Kapuas	2.188	21.171	-	349	1.763	25.471

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Tengah merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekosistem pesisir Kalimantan Tengah secara umum berupa daerah estuaria, perairan pantai dan laut dangkal, serta hutan rawa. Sub ekosistem yang dominan adalah ekosistem mangrove, pantai berpasir, estuaria dan rawa banjir (*flood plain*).

Hutan mangrove merupakan nama kolektif untuk vegetasi pohon yang menempati pantai berlumpur di dalam wilayah pasang surut, dari



tingkat air pasang tertinggi sampai tingkat air pasang terendah. Di Kalimantan Tengah, tingkat kerapatan mangrove saat ini berada di pasir pantai Kalimantan Tengah terdiri dari kerapatan jarang sampai kerapatan tinggi. Sebaran hutan mangrove wilayah pesisir di laut Kalimantan Tengah berada di kabupaten Sukamara dengan luas 490,92 ha, Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 6.932,86 ha, Kabupaten Seruyan seluas 6.967,10 ha, Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 10.001 ha, Kabupaten Katingan seluas 8.402,62 ha, Kabupaten Pulang Pisau seluas 280 ha, dan Kabupaten Kapuas seluas 990,99 ha.

Ekosistem padang lamun (*seagrass beds*) merupakan salah satu ekosistem laut yang paling produktif karena di sini terjadi proses rantai makanan yang cukup lengkap dengan adanya proses fiksasi sejumlah karbon. Bila dilihat dari fungsi ekologis, ekosistem padang lamun dapat mencegah terjadinya erosi karena vegetasi lamun dapat memperlambat gerakan air yang disebabkan ombak dan menyebabkan perairan menjadi tenang. Sistem perakaran lamun yang padat dan saling menyilang dapat menstabilkan dasar laut dan mengakibatkan tertanamnya lamun dengan kokoh tidak mudah tercabut oleh gelombang. Sebaran ekosistem padang lamun di Kalimantan Tengah terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 210 ha.

Terumbu Karang adalah bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan makhluk laut lainnya. Karang yang hidup di laut, tampak terlihat seperti batuan atau tanaman. Tetapi mereka sebenarnya adalah sekumpulan hewan-hewan kecil yang dinamakan polip. Ada dua macam karang, yaitu karang batu (*hard corals*) dan karang lunak (*soft corals*). Karang batu merupakan karang pembentuk terumbu karena tubuhnya yang keras seperti batu. Kerangkanya terbuat dari kalsium karbonat atau zat kapur. Karang baru bekerja sama dengan alga yang disebut *zooxanthellae*. Karang batu hanya hidup di perairan dangkal dimana sinar matahari masih didapatkan. Karang lunak bentuknya seperti tanaman dan tidak bekerja sama dengan alga. Karang lunak dapat hidup baik di perairan dangkal maupun di perairan dalam yang gelap. Di Kalimantan Tengah, ekosistem terumbu karang hanya terdapat di



Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 200 ha dan di Kabupaten Seruyan seluas 35.386 ha.

Berikut ini potensi ekosistem wilayah pesisir Kalimantan Tengah :

Tabel 4.15. Ekosistem Wilayah Pesisir Kalimantan Tengah

Kecamatan	Ekosistem (Ha)						
	Terumbu Karang	Padang Lamun	Pantai Berpasir	Mangrove	Rawa	Air Hitam	Hutan
Jelai	+	-	46	135	278	-	20.111
Lunci	+	-	40	321	-	-	45.466
Arut Selatan	-	-	734	725	1.300	-	22.079
Kumai	300	210	960	6.068	2.647	-	180.792
Seruyan Hilir	200	-	1.290	8.020	2.978	-	329.693
Teluk Sampit	-	-	354	10.167	134	-	45.059
M. Hilir Selatan	-	-	-	-	-	-	4.042
Pulau Hanaut	-	-	-	2.810	-	-	29.203
Katingan Kuala	-	-	94	11.250	760	-	54.319
Mendawai	-	-	-	-	1.450	-	130.297
Kahayan Kuala	-	-	128	5.933	660	-	69.567
Sebangau Kuala	-	-	-	7.067	900	3.117	138.182
Kapuas Kuala	-	-	-	6.121	1.660	-	22.862

Sumber : Renstra WP3K Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka meminimalisir kerusakan pada daerah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil maka dilakukanlah konservasi sebagai suatu upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem yang terdapat di kawasan tersebut. Kawasan konservasi laut di Kalimantan Tengah terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berada di Gosong Senggora dan Sepagar dengan luas areal 61.362,15 Ha adalah wilayah perairan laut di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dipolaruangkan dalam RZWP3K Kalteng sebagai kawasan konservasi perairan/wisata perairan. Kebijakan sebagai kawasan konservasi perairan/wisata perairan dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/551/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/543/2018



tanggal 28 Desember 2018 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2038. Sejak tahun 2019, penetapan kawasan konservasi di Kalimantan Tengah ini sudah sampai pada tahapan penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kawasan ini juga merupakan kawasan yang menjadi target kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif. Pada kawasan ini jenis utama yang dilindungi adalah terumbu karang dan Ikan Dugong. Selain itu, dilakukan pula jenis kegiatan konservasi daerah perlindungan laut di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang dengan jenis utama yang dilindungi adalah terumbu karang dan padang lamun. Kegiatan konservasi ini diharapkan juga didukung oleh seluruh masyarakat, khususnya yang bermukim di pesisir, sehingga kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil ini dapat teteap terjaga kelestariannya.

Kawasan wisata bahari terdiri dari aktivitas mulai dari adanya fenomena alam, budaya dan kehidupan sosial masyarakat, biota laut, serta kualitas perairan. Sampai saat ini potensi wisata bahari di Provinsi Kalimantan Tengah belum tergalai dan belum termanfaatkan. Potensi wisata domestik maupun asing terus ditingkatkan melalui program pengembangan pariwisata. Pada masa mendatang, pemanfaatan ruang bahari sebagai wisata dapat memberikan dampak positif bagi pemasukan pendapatan daerah, akan tetapi dapat berperan besar terhadap kerusakan ekosistem.

Beberapa kegiatan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2021 adalah :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi

Dalam rangka Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi ada satu sub kegiatan yaitu Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan



Penetapan dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini dilakukan kegiatan berupa publikasi SOP pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan di Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Juni 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)/Kelompok Pengawas Konservasi (KOMPAK) sebanyak 40 orang dengan narasumber Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir dengan materi berupa Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Menteri KP No 24/Kepmen-KP/2019 dan Publikasi SOP Pengelola Kawasan Konservasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu POKMASWAS/KOMPAK mempunyai prosedur dalam tiap pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan. Selain itu dilakukan kegiatan berupa pelatihan selam di kolam renang Hotel Kecubung Pangkalan Bun dan Perairan Senggora Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 24 – 28 Mei 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 3 orang peserta yang merupakan staf Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari kegiatan ini diharapkan pengelola kawasan konservasi memiliki keterampilan menyelam. Selain itu dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kawasan konservasi berupa pengadaan Handy Talky untuk POKMASWAS di Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 25 unit. Selain itu ada juga pengadaan GPS sebanyak 8 unit dan peralatan selam sebanyak 1 paket untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi di WP3K berdasarkan penetapan dari pusat. Selain itu juga dilakukan pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi di KKPD Senggora Desa Teluk Bogam, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 36 m².

2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ada satu sub kegiatan yaitu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Dalam Rangka pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan Webinar Sosialisasi Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan



Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan Tema “Optimalisasi dan Sinergitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut Mewujudkan Kalteng semakin Berkah”. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *ZOOM Cloud Meetings* dengan dihadiri oleh 235 peserta yang berasal dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan Pemerintah Kabupaten di 7 (tujuh) kabupaten pesisir yaitu Dinas Perikanan, DPMPTSP dan Bappeda, SKIPM Palangka Raya, BPSPL Pontianak, BPDASHL Kahayan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan Tengah II, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia wilayah Kalteng, Camat Kumai Kobar, Camat Teluk Sampit Kotim, PT. PLN, PT. Telkom, WWF Indonesia Kalteng, Kalteng Pos, dan Perwakilan Universitas baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun Universitas lain di Indonesia baik dosen maupun mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya menyamakan persepsi dan peningkatan sinergitas guna terwujudnya optimalisasi dan sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut Kalteng menuju Kalteng yang semakin Berkah.

3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ada satu sub kegiatan yaitu Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat mengenai penataan kawasan wilayah pesisir. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain penanaman mangrove dan sosialisasi manfaat hutan mangrove. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar mangrove, kesehatan lingkungan pantai dan laut, dan mitigasi bencana di daerah pesisir.



4.5. Unit Pelaksana Teknis

4.5.1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau yang dilaksanakan pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi perkantoran;
2. Pembersihan lingkungan kerja;
3. Pelayanan umum terkait layanan informasi kepada masyarakat tentang UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai;
4. Pengadministrasian aset negara dan daerah agar dapat tersedia data yang akurat;
5. Penyediaan data dan informasi terkait aktivitas UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai, terutama tentang jenis budidaya yang tersedia; dan
6. Pemeliharaan benih ikan dan indukan.

UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

4.6.2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.

Pada tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, maupun administrasi kegiatan teknis yang berjalan selama 1 (satu) tahun;



2. Kegiatan pembinaan pembudidaya tambak udang, dengan melakukan jasa konsultasi teknis maupun kunjungan lapangan bagi petambak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan;
3. Kegiatan pembenahan fasilitas-fasilitas penunjang budidaya yang ada di UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran, seperti penambalan dan pengecatan bak larva.
4. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, dengan melakukan konsultasi maupun koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

4.6.3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Pada tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada UPT Pelabuhan Perikanan Kumai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin dan operasional kantor, terkait administrasi dan pelayanan umum;
2. Pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
3. Pemantauan aktivitas tambat-labuh dan bongkar-muat kapal perikanan;
4. Pemantauan layanan usaha;
5. Pertemuan koordinasi lintas instansi mitra;
6. Penyediaan data dan informasi terkait aktivitas Pelabuhan Perikanan Kumai, terutama produksi pendaratan hasil tangkapan, dan penggunaan BBM pada SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan);

UPT Pelabuhan Perikanan Kumai telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan



baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

4.6.4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Pada tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin dan administrasi kantor; terkait kebersihan kantor maupun fasilitas lainnya, administrasi kepegawaian, pengadministrasian barang milik negara/daerah, surat-menyurat, dan pelayanan umum lainnya;
2. Penyediaan data dan informasi terkait aktivitas Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, terutama produksi pendaratan hasil tangkapan, pabrik es, dan penggunaan BBM pada SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan);
3. Pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan dengan melaksanakan pengadministrasian pelaporan keberangkatan-kedatangan kapal perikanan, layanan tambat-labuh, keterangan asal ikan;
4. Pemantauan aktivitas tambat-labuh dan bongkar-muat kapal perikanan sehingga aktivitas tambat-labuh dan bongkar-muat oleh kapal perikanan dapat termonitor dan berjalan dengan lancar;
5. Pemantauan layanan usaha dan tata kelola yang dilaksanakan dengan tersedianya layanan usaha pelabuhan perikanan (SPDN, pabrik es, *coldstorage*, kios, dll) dan tata kelola yang mampu melayani nelayan, pengolah ikan, dan masyarakat umum di Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang;
6. Pertemuan pembinaan masyarakat nelayan dan pengolah ikan dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi pelayanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang dan pelaksanaan peraturan yang berlaku;



UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai alat tangkap yang dilarang pemerintah dan masih adanya *illegal fishing*;
2. Kualitas sumber daya manusia yang kurang dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan yang ada;
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kegiatan di sektor kelautan dan perikanan;
4. Alat tangkap yang digunakan nelayan masih tradisional;
5. Masih kurangnya modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terutama bagi pembudidaya ikan maupun UPI skala kecil; dan
6. Kurangnya pemahaman pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

5.2. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan patroli pengawasan ke wilayah perairan laut untuk selanjutnya diberikan pembinaan kepada kapal penangkap ikan yang melanggar aturan dengan pemberian brosur tentang larangan *illegal fishing* dan menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang seperti lempara dasar;
2. Meningkatkan SDM masyarakat perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas;



3. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang baru dan juga memperbaiki sarana prasarana yang ada sehingga meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;
4. Memberikan bantuan kepada para nelayan berupa kapal, mesin kapal, maupun alat tangkapnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan;
5. Mencarikan peluang-peluang akses modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa bantuan modal dan bantuan sarana produksi maupun kegiatan-kegiatan temu usaha yang juga melibatkan pihak perbankan; dan
6. Melakukan pembinaan dan penilaian cara budidaya ikan yang baik (CBIB) kepada pembudidaya ikan sehingga nanti memiliki sertifikasi CBIB.



BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran biaya yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah sebesar Rp.30.866.401.459,- yang terdiri dari APBD sebesar Rp.29.287.985.459,- dan APBN sebesar Rp.1.578.416.000,-.
2. Dana APBD terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 11.381.979.965,- dengan realisasi Rp 10.888.279.793,- (95,66 %) yang digunakan untuk 6 program kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.039.186.795,- dengan realisasi Rp.9.282.696.008,- (77,10 %) yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Tambahan Penghasilan PNS.
3. Dana APBN sebesar Rp.1.578.416.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.517.429.317,- atau 96,14 % yang bersumber dari dana Dekonsentrasi (DK).
4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2021 dengan pendanaan berasal dari APBD maupun APBN tidak mengalami hambatan yang berarti dan telah terealisasi secara fisik sebesar 100,00 % .

6.2. Saran

Laporan Tahunan ini disusun sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Oleh karena itu, diharapkan dari penyusunan Laporan Tahunan ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga dapat menjadi acuan rencana kerja di masa mendatang dan meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan selanjutnya.